

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan, Kabupaten Majalengka belum melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Bila dilihat dari perencanaannya pemerintah setempat telah menetapkan misi dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan untuk mencapai visi Kabupaten Majalengka dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun sudah termasuk dalam sasarannya. Selain itu juga pemerintah juga sudah melakukan persiapan, diantaranya adalah dengan membentuk tim akselerasi wajib belajar 12 tahun yang diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah khususnya pada jenjang sekolah menengah.

Sedangkan dalam pelaksanaannya, Kabupaten Majalengka masih melaksanakan wajib belajar 9 tahun, walaupun pemerintah setempat sudah melakukan berbagai persiapan menuju pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Hal ini dikarenakan masih rendahnya APK sekolah menengah di daerah tersebut. Maka dari itu pemerintah daerah setempat telah mensiasatinya dengan melaksanakan PMU (Pendidikan Menengah Universal) atau rintisan wajib belajar 12 tahun.

Dalam evaluasi pelaksanaan wajib belajarnya, di dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2014-2018 tertulis bahwa pemerintah daerah telah menargetkan ketercapaian wajib belajar 12 tahun di tahun 2018. Namun, berdasarkan data yang didapat bahwa yang mencapai target pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Provinsi Jawa Barat hanya 4 daerah dari 27 kota dan kabupaten. Kabupaten Majalengka, termasuk daerah yang belum mencapai pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, hal ini disebabkan karena masih banyaknya anak yang berhenti sekolah pada jenjang sekolah menengah atau yang tidak sekolah sama sekali.

Berdasarkan hasil evaluasi, Kabupaten Majalengka sangat membutuhkan strategi alternatif agar dapat mencapai tujuannya dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Strategi yang dapat dilaksanakan adalah (1) membuat Peraturan daerah

Irza Adya Sugardha, 2018

MANAJEMEN STRATEGIS WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun di Majalengka, (2) mengembangkan pola atau model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (3) mengangkat guru baru atau melakukan penempatan atau pemerataan guru, sesuai dengan yang kebutuhan sekolah yang kekurangan guru dan meningkatkan kesejahteraannya dengan memberikan insentif guru di daerah terpencil dan memberikar *reward* untuk guru yang berprestasi ,(4) mengadakan sosialisai tentang pentingnya pendidikan dan wajib belajar 12 tahun oleh tim akselerasi wajib belajar 12 tahun, (5) memberikan beasiswa untuk siswa yang hafal al-Qur'an, (6) meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan Kesimpulan yang telah diuraikan di atas, dibawah ini terdapat beberapa rekomendasi yang bisa disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Dinas Pendidikan :

1. Melakukan sosialisasi Wajar 12 tahun dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat termasuk lembaga keagamaan, organisasi sosial, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendukung, menyelenggarakan, dan mengembangkan Program Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi semua.
2. Menyediakan berbagai alternatif layanan pendidikan menengah sesuai dengan model pendidikan yang dibutuhkan, baik formal (umum dan kejuruan) maupun non formal untuk memenuhi kebutuhan, kondisi, dan potensi anak termasuk anak dari keluarga miskin, keluarga marginal dan yang tinggal di wilayah pedesaan, terpencil, dan pedalaman.
3. Disegerakan perumusan atau pembuatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 Tahun.

4. Melanjutkan eksistensi tim akselerasi wajib belajar 12 tahun yang sudah dibentuk sebelumnya untuk meningkatkan angka partisipasi khususnya di sekolah menengah.
5. Pemerintah daerah seharusnya membuat strategi tidak hanya fokus dengan alokasi atau anggaran, tetapi juga harus merumuskan strategi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan 12 tahun.